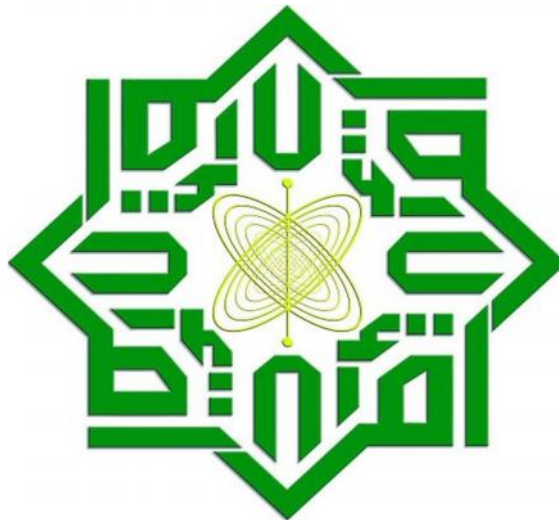


**PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR
21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARI'AH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi
Syarat-Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Serjana Ekonomi Syari'ah
(SE.Sy)



Oleh :

ANANDA HARRIO AULIA
NIM. 10525001133

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2012**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **“Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah”**. Beberapa kalangan mencurigai Islam sebagai faktor penghambat pembangunan, pandangan ini berasal dari para pemikir barat, dan tidak sedikit pula para intelektual muslim yang meyakiniinya. Kesimpulan yang agak tergesa-gesa ini hampir dapat dipastikan karena kesalah pahaman terhadap Islam. Seolah-olah Islam merupakan agama yang hanya berkaiatan masalah ritual (ibadah) saja, bukan sebagai suatu sistem yang komprehensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk masalah pembangunan ekonomi dan industri perbankan sebagai salah satu motor penggerak roda perekonomian. Syari’at Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna yang tidak saja mengatur hubungan manusia dengan tuhan nya dalam bentuk ibadah, tapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut Muamalat

Masalah dalam penelitian ini adalah; Apa saja pasal-pasal yang memuat prinsip-prinsip muamalah dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah ?, dan Bagaimana Prinsip Muamalah dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah ?

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah; Metode deduktif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang bersifat umum, kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus. Dan metode induktif, yaitu dengan jalan mengambil data yang bersifat khusus, kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui prinsip-prinsip muamalah dalam Perbankan Syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.Untuk mengetahui Implementari Prinsip-prinsip Muamalah dalam Perbankan Syariah berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Sedangkan metodologi penulisan yang digunakan

peneliti adalah metodologi deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mengumpulkan data yang diperlukan dan mengklarifikasikan data berdasarkan persamaan jenisnya.

Pasal-pasal yang memuat prinsip-prinsip muamalah dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sebagaimana yang termuat secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (1), ayat (12), dan ayat 25 selanjutnya pasal 2, dan pasal 19, dan pasal 55. Namun dengan demikian telah mengakomodasi prinsip-prinsip muamalah. Dalam menjalankan peranannya Bank Syariah harus mengikuti aturan-aturan perundang-undangan dan Syariah Islam.

Prinsip-prinsip muamalah dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna'. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh. Dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK.....	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II : PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH DALAM ISLAM.....	12
A. Pengertian Muamalah.....	12
B. Dasar-dasar Hukum Muamalah.....	17
C. Prinsip-Prinsip Muamalah.....	19
BAB III : UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH.....	27
A. Sejarah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah	27
B. Sejarah Singkat tentang Perbankan Syariah	32
C. Asas, Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah	38

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Pasal-pasal yang memuat prinsip-prinsip muamalah.....	42
B. Prinsip Muamalah dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah	56
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanyalah untuk Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya buat alam semesta, seiring dengan itu shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan risalah Islamiyah-Nya kepada segenap umat dijagat raya ini sebagai hidayah dan *irsyadah* yang dapat menjamin kebahagiaan hidup ummat manusia di dunia dan *ukhrowi*. Dengan rahmat dan karunia Allah dan diringi dengan ketekunan serta kesabaran dan bantuan dari semua pihak yang berkompeten, maka penulis dapat menyusun skripsi dengan judul: **“Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah”**.

Dalam menyusun skripsi ini sudah barang tentu terdapat kekurangan, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini tak terlepas dari bantuan berbagai pihak, dan penulis merasa berkewajiban untuk berterimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Untuk yang mulia Ayahanda Mario Sardi, SE, dan Ibunda Harmidawati, S.Pd, yang selalu memanjatkan do’anya untuk keberhasilan penulis dan selalu memberikan motivasi saat penulis kehilangan semangat untuk menyelesaikan studi.
2. Bapak Prof. DR. H. M. Nazir selaku Rektor UIN SUSKA Riau, dan Pembantu Rektor I, Pembantu Rektor II, dan Pembantu Rektor III,
3. Bapak DR. Akbarizan, M.Ag, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, serta Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III
4. Bapak Mawardi, S. Ag, M. Si dan Darmawantia, I, M. Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan Sekretaris Jurusan.
5. Bapak Aris Bintania, MA selaku Penasehat Akademis.

6. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag. Selaku pembimbing yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi
7. Kepada seluruh Bapak Dosen dan Ibu Dosen serta karyawan dan karyawan pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
8. Kepada suami tercinta H. Musdarizal, S. Pdi yang selalu menemani dan memberikan dukungan baik secara moril maupun materil. Dan ananda tersayang M. Rasyada Musda Maulana yang selalu menghibur penulis disaat kejenuhan melanda dalam penulisan karya ilmiah ini.

Demikianlah pengantar ini penulis sampaikan, sekali lagi penulis ucapkan maaf dan terimakasih yang sebesar-sebesarnya atas kekurangan dan kesalahan penulis.

Billahi Taufiq walhidayah,

Pekanbaru, 18 Juni 2012

Penulis

Ananda Harrio Aulia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Ekonomi Indonesia yang akan datang harus berbeda dari wujud perekonomian Indonesia pada masa lalu. Arah kebijakan pembangunan dalam bidang ekonomi sebagaimana tersebut dalam Propenas 2000-2004 dalam bidang ekonomi antara lain dengan cara mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan.

Beberapa kalangan mencurigai Islam sebagai faktor penghambat pembangunan, pandangan ini berasal dari para pemikir barat, dan tidak sedikit pula para intelektual muslim yang meyakini. Kesimpulan yang agak tergesa-gesa ini hampir dapat dipastikan karena kesalahan pemahaman terhadap Islam. Seolah-olah Islam merupakan agama yang hanya berkaitan masalah ritual (ibadah) saja, bukan sebagai suatu sistem yang komprehensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk masalah pembangunan ekonomi dan industri perbankan sebagai salah satu motor penggerak roda perekonomian.¹

Syari'at Islam berlaku secara universal sesuai dengan perkembangan umat manusia yang meliputi tempat, dan waktu yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan menolak segala kerusakan bagi manusia. Islam memberikan prioritas yang tinggi kepada akal untuk menganalisa hukum-hukum syara', meneliti perkembangan dengan tetap berpedoman kepada nash-nash yang telah

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 3

ada, supaya hukum Islam bersifat elastis.²

Disamping itu syari'at Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna yang tidak saja mengatur hubungan manusia dengan tuhan dalam bentuk ibadah, tapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut Muamalat. Manusia dalam pergaulan hidupnya tetap saling membutuhkan satu sama lainnya, baik menyangkut hubungan sosial, ekonomi dan sebagainya.

Al-Qur'an menyangkut hubungan sosial, ekonomi di anjurkan oleh Allah SWT: Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Maidah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya; “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”(QS. Al-Maidah: 2).³

Sebagaimana, diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Guna mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah

² T. M. Hasbi Al-Shiddiqi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 94

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Terjemahan Al-Qur'an, 1987), h. 157

perekonomian internasional.⁴

Jauh dari sebelum pemikiran ekonom-ekonom dunia merumuskan tentang perekonomian Allah telah menjelaskan tentang aturan yang jelas tentang ekonomi bagi umat manusia, karena dalam Islam menghubungkan antara aspek ibadah dan muamalah ini secara sangat menarik.

Al-Qur'an menyatakan bahwa muamalah itu dibolehkan: Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Jumu'ah (62): 9-10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا
الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي
الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya; “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui. Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (QS.Al-Jumu'ah: 9-10).⁵

Maka Perbankan Syari'ah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Pengaturan tersebut di antaranya dituangkan dalam Undang-Undang Perbankan

⁴ Himpunan Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Syari'ah, Dilengkapi 44 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang Produk Perbankan Syari'ah, (Yogyakarta: Pustaka Zeendy, 2009), h. 67

⁵ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 341

Syari'ah. Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syari'ah menjadi kebutuhan dan keniscayaan bagi berkembangnya lembaga tersebut. Pengaturan mengenai Perbankan Syari'ah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional Perbankan Syari'ah, dimana, di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha Bank Syari'ah berkembang cukup pesat.

Guna menjamin kepastian hukum bagi *stakeholder* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syari'ah, dalam Undang-Undang Perbankan Syari'ah ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan Syari'ah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syari'ah maupun UUS yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan keSyari'ahan operasional Perbankan Syari'ah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syari'ah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim.⁶

Pembangunan bidang ekonomi di Indonesia telah berjalan setelah kemerdekaan dengan dasar-dasar pengelolaan perekonomian negara yang diatur dalam pasal 33 ayat (1) hasil amandemen IV UUD 1945 disebutkan "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas-asas kekeluargaan". Pembangunan ekonomi suatu negara diperlukan adanya

⁶ Himpunan Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Syari'ah, Dilengkapi 44 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang Produk Perbankan Syari'ah, *Loc. Cit.*

pengaturan mengenai pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta dimanfaatkan secara maksimal bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Lembaga-lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank haruslah dapat meyakinkan nasabahnya dalam mengelola dan menggerakkan semua potensi ekonomi agar berdaya guna dan berhasil guna. Para ahli ekonomi Indonesia telah memberikan pendapatnya tentang solusi untuk menyelesaikan berbagai problem yang menyangkut perbaikan ekonomi Indonesia. Yang diantaranya ada yang berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia selama ini tidak berpihak kepada ekonomi rakyat, oleh karena itu, solusi untuk masalah ini adalah selain perlunya membangun ekonomi Indonesia dengan konsep ekonomi kerakyatan, juga perlu menciptakan strategi pembangunan dengan lebih banyak melibatkan rakyat dalam berbagai bidang ekonomi dan perdagangan.

Krisis Perbankan Nasional khususnya dan Perbankan Internasional pada umumnya maka perlu adanya suatu formulasi sistim perbankan alternatif. Hal ini direspon pemerintah dengan diberlakukannya undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Wirdyaningsih, mengatakan, diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tanggal 25 Maret 1992, menandai adanya kesepakatan rakyat dan bangsa Indonesia untuk menerapkan Dual Banking.

Sistem perbankan ganda di Indonesia. Respon pemerintah semakin besar dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dimana

dalam Undang-undang tersebut Perbankan Syari'ah diakui sebagai sub sistim Perbankan Nasional.

Respon Pemerintah semakin mantap dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syari'ah dimana dalam konsideran menimbang pada huruf (a, b, dan c) disebutkan bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistim ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaa, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syari'ah ; dan bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan Syari'ah semakin meningkat ; dan bahwa perbankan Syari'ah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional.

Bank merupakan badan hukum atau lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dengan tujuan memnuhi kebutuhan kredit dengan modal sendiri atau orang lain.

Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih, baik antara seorang pribadi dengan pribadi lain, maupun antar badan hukum, seperti perseroan, firman, yayasan, Negara dan sebagainya. Ini menimbulkan pertanyaan apakah prinsip muamalah itu benar dituangkan dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di Indonseia dan diterapkan oleh Bank Syariah yang ada di Indonesia.

Karena itulah dilakukan penelitian dengan judul: **“Prinsip-prinsip Muamalah dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah”**.

Penelaahan terhadap prinsip-prinsip muamalah yang dilakukan oleh perbankan syariah, karena Perbankan Syariah merupakan institusi atau lembaga keuangan yang menampung uang dari masyarakat berupa tabungan, deposito, giro, dana haji, dan lain sebagainya. Sebagai lembaga keuangan yang berprinsipkan Islam sudah wajib untuk menerapkan prinsip muamalah yang telah diajarkan oleh Islam.

Perbankan Syariah mesti mempunyai legitimasi hukum dalam menjalankan setiap kegiatan dan sistem yang mesti menjadi acuan bagi perbankan itu dalam setiap operasinya, untuk memenuhinya maka pemerintah mensahkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2012 tentang Perbankan Syariah di Indonesia. Oleh karena itulah penulis tertarik untuk meneliti prinsip-prinsip muamalah yang ada dalam undang-undang tersebut, karena Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 yang merupakan Undang-undang Perbankan Syariah sampai saat ini yang mengatur bagaimana sebuah perbankan syariah beroperasi dan menghimpun dana dari masyarakat.

B. Batasan Masalah

Yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah pasal-pasal yang memuat tentang prinsip-prinsip muamalah dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah diatas maka, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja pasal-pasal yang memuat prinsip-prinsip muamalah dalam

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah?

2. Bagaimana Prinsip Muamalah dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pasal-pasal yang memuat prinsip-prinsip muamalah dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- b. Untuk mengetahui Prinsip Muamalah dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

2. Kegunaan Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pasal-pasal yang memuat prinsip-prinsip muamalah dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- b. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang Prinsip Muamalah dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah study kepustakaan (*library research*) dimana data dan sumber diperoleh dari penelaahan terhadap literatur yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

1. Subjek

Subjek dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008

tentang Perbankan Syari'ah.

2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pasal-pasal yang memuat prinsip-prinsip muamalah pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Dan Prinsip-prinsip Muamalah dalam Perbankan Syari'ah berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan primer

Merupakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, dan Fatwa MUI tentang Prinsip Muamalah pada Perbankan Syari'ah, .

b. Bahan sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku tentang Muamalah, dokumen-dokumen tentang muamalah dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

c. Bahan tersier

Merupakan bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder seperti kamus, ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan data

Dalam penulisan ilmiah ini, penulis menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut :

a. Deskriptif Kualitatif , yaitu mengumpulkan informasi aktual secara terperinci dari data yang diperoleh untuk menggambarkan secara tepat

masalah yang diteliti dengan menganalisa data tersebut sebelumnya.

- b. Deduktif, yaitu mengumpulkan data-data, keterangan, pendapat-pendapat yang bersifat umum dan ditarik kesimpulan khusus dari data-data tersebut.
- c. Komperatif, yaitu dengan membandingkan penerapan prinsip-prinsip muamalah dalam perbankan Syari'ah menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, guna menjawab perumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

5. Analisa Data

Data-data yang sudah terkumpul melalui tahapan-tahapan pengumpulan data, dan untuk selanjutnya di analisis dengan menggunakan teknik analisis isi (konten analisis), yaitu mempelajari pesan-pesan yang ada pada literatur melalui kata-kata, pada kalimat dan latar belakang atau situasi.

6. Metode Penulisan

Setelah data terkumpul, maka penulis melakukan pengelompokkan dan penulisan terhadap data tersebut dengan menggunakan metode:

- a) Metode deduktif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang bersifat umum, kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
- b) Metode induktif, yaitu dengan jalan mengambil data yang bersifat khusus, kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.
- c) Metode Deskriptif, yaitu dengan cara mengemukakan permasalahan secara objektif kemudian permasalahan ini dianalisa secara kritis.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan perincian sebagai berikut. Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan. Adapun yang dibicarakan dalam bab ini adalah persoalan prinsip-prinsip muamalah dalam undang-undang perbankan syariah.

Bab II memberikan tinjauan umum tentang berbagai teori prinsip-prinsip muamalah yang berkenaan pengertian muamalah, muamalah.

Bab III mengungkapkan sejarah Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan pasal-pasal yang menjelaskan prinsip Muamalah yang terdapat pada Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 Dalam Bab ini dikemukakan yang berkenaan dengan Sejarah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah dan Sejarah Singkat tentang Perbankan Syari'ah,

Bab IV membicarakan prinsip-prinsip muamalah dalam Perbankan Syari'ah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, dan Implementasi Prinsip-prinsip Muamalah dalam Perbankan Syari'ah berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah

Bab V berisikan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya disertai dengan beberapa saran.

Selanjutnya diikuti oleh daftar kepustakaan yang dijadikan sumber-sumber dalam pembahasan ini dan juga beberapa lampiran.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH DALAM ISLAM

A. Pengertian Muamalah

Muamalah kemudian difahami hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dengan sesamanya yang menyangkut harta dan hak serta penyelesaian kasus diantara mereka. Pengertian ini memberikan gambaran bahwa muamalah hanya mengatur permasalahan hak dan harta yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain, atau antara seseorang dengan badan hukum, atau antara badan hukum dengan badan hukum yang lain.¹ Bank adalah badan hukum atau lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalulintas pembayaran dan peredaran uang dengan tujuan memenuhi kebutuhan kredit dengan modal sendiri atau orang lain.

Perekonomian modern perbankan dipandang sebagai industri, yaitu industri perbankan, yang menghasilkan bermacam-macam produk berupa jasa, yang disebut produk perbankan. Produk ini ditawarkan kepada konsumen dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak dalam transaksi. Konsumen yang dimaksud adalah orang perorangan, dan bisa juga badan hukum.²

Perbankan di Indonesia diatur oleh undang-undang yaitu undang-undang perbankan. Dalam perekonomian global, sulit menemukan standar etika bisnis, kalau kita melihat etika bisnis yang ada dalam Islam dan tidak berpandangan

¹ Nurfaizal, *Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Syari'ah*, (ttp, tth), h. 181, Jurnal Hukum Islam, Vol X, No 1, 2 Juli 2010

² *Ibid.*

subjektif, ada nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh manusia beradab. Bermuamalah dalam Islam ada prinsip-prinsip etika yang harus dijunjung tinggi oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi. Prinsip tersebut tidak hanya dijunjung tinggi oleh manusia beradab dan mengandung nilai-nilai universal, tetapi juga bersumber dari wahyu.³ Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama.

Al-Qur'an menyatakan bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama: Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Baqarah (2): 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya; “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”(QS. Al-Baqarah: 30).⁴

Untuk mencapai tujuan di atas, Allah memberikan petunjuk melalui para Rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia,

³ *Ibid.*

⁴ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 7

baik akidah, ahlak dan Syari'ah.⁵ Dua komponen pertama, akidah dan ahlak, bersifat konstan. Keduanya tidak mengalami perubahan apapun dengan berbedanya waktu dan tempat. Syari'ah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat yang berbeda-beda sesuai dengan masa Rasul masing-masing.

Al-Qur'an menyatakan Syari'ah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat yang berbeda-beda sesuai dengan masa Rasul : Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Maidah (5): 48

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَا جَا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۚ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۚ

Artinya; “Dan kami Telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu”(QS. Al-Maidah: 48).⁶

Sifat Syari'ah bukan hanya komprehensif, tetapi juga universal. Komprehensif berarti Syari'ah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit.*, h. 4

⁶ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 117

ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Universal bermakna bahwa Syari'ah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat. Universalitas ini tanpa jelas terutama pada bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membedakan antara muslim dan nonmuslim.⁷

Menurut Mohammad Hidayat, ekonomi islam berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:⁸

- a. Manusia merupakan khalifah dan pemakmur bumi. Al-Qur'an menyatakan Manusia merupakan khalifah dan pemakmur bumi: Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Baqarah (2): 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya; “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”(Al-Baqarah: 30).⁹

- b. Asas keadilan
- c. *Morality Building*
- d. Kebebasan bertransaksi

⁷ Ibid.

⁸ Hidayat Mohammad, *an Overview of Islamic Financing industry in Indonesia*, dalam Pelatihan Dasar Perbankan Syari'ah, 21-23 Maret 2007, Bogor, Batasa Tazkia Consulting

⁹ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 7

- e. Dilarang mengambil keuntungan, memakan secara ilegal, kecuali dengan perniagaan yang saling ridhoi. Al-Qur'an menyatakan Dilarang mengambil keuntungan, memakan secara ilegal, kecuali dengan perniagaan yang saling ridho: Hal tersebut dijelaskan dalam An Nisaa' (3): 29-30

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۖ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

Artinya; “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

“Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah” (QS. An Nisaa': 29-30).¹⁰

- f. Setiap harta yang dimiliki terdapat bagian golongan tidak mampu. Al-Qur'an menyatakan harta yang dimiliki terdapat bagian golongan tidak mampu: Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Ma'aarij (70): 24-25

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٧٠﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٧١﴾

Artinya; “Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu”. Dan “Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)” (Al-Ma'aarij: 24-25).¹¹

- g. Penolakan terhadap monopoli. Al-Qur'an menyatakan Penolakan terhadap monopoli: Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Hasyr (59): 7

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya; “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota. Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”(QS. Al-Hasyr: 7).¹²

- h. Uang bukan komoditi
- i. Menghindari iddle asset dan monopoli
- j. Menganut *economic value of time* dan menolak teori *time value of money*
- k. Melarang tujuh transaksi prinsip, berupa; maysir, maksiat, dzalim, gharar, haram, riba dan riswa (suap).¹³

B. Dasar Hukum Muamalah

Adapun dasar hukum muamalah sebagai yang di jelaskan dalam surat Al-Hadiit berikut;

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ ۖ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya; “siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan

¹² Ibid.

¹³ Nafrizal, *op. cit.*, h. 183

Dia akan memperoleh pahala yang banyak” (Q.S. 57:11).¹⁴

Selanjutnya Allah juga menjelaskan tentang hokum muamalah dalam surat Yusuf ayat berikut ini;

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

Artinya; “berkata Yusuf, Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan”.(Q.S. 12:66)

Selanjutnya Allah juga menjelaskan tentang hokum muamalah dalam surat An-Nisa’ ayat berikut ini;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢١﴾

Artinya; “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”(Q.S. 4:29).¹⁵

Selanjutnya Allah juga menjelaskan tentang hokum muamalah dalam surat Al-Baqarah ayat berikut ini;

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya; “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri

¹⁴ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 345

¹⁵ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 89

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”(Q.S. 2:275).¹⁶

Selanjutnya legitimasi hukum muamalah berdasarkan Undang-undang yang berlaku di Indonesia, antara lain Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, selanjutnya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Selanjutnya Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia .

Selanjutnya dasar hukum muamalah dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di Indonesia.

C. Prinsip-Prinsip Muamalah

1. Prinsip-prinsip Muamalah dalam Islam

Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi. Dari pengertian ini ada dua hal yang menjadi ruang lingkup dari muamalah.

Pertama, bagaimana transaksi itu dilakukan dengan etika (*adabiyah*) suatu transaksi, seperti ijab Kabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, adanya hak dan kewajiban masing-masing, kejujuran, atau mungkin

¹⁶ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 213

ada penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam kehidupan masyarakat.

Kedua bentuk transaksi ini menyangkut materi (*madiyah*) transaksi yang dilakukan, seperti jual beli, pegang gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan utang, perseroan harta dan jasa, sewa menyewa, jatuh bangkrut, hak guna pakai, dan sebagainya.¹⁷

Prinsip-prinsip muamalah berada pada wilayah etika (*adabiyah*) yaitu bagaimana transaksi itu dilakukan. Prinsip-prinsip itu pada intinya menghendaki agar pada setiap prosesi transaksi tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak, atau hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Prinsip-prinsip itu antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, setiap transaksi pada dasarnya mengikat pihak-pihak yang melakukan transaksi itu sendiri. Al-Qur'an menyatakan setiap transaksi pada dasarnya mengikat pihak-pihak yang melakukan transaksi itu sendiri: Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Maidah (5): 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ۖ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya; “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”(QS. Al-Maidah: 1).¹⁸

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 129

Yang dimaksud dengan Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

Al-Qur'an menyatakan setiap transaksi pada dasarnya mengikat pihak-pihak yang melakukan transaksi itu sendiri: Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Israa' (17): 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ
الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya; “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya”(Al-Israa': 34).¹⁹

Maksud dari ayat-ayat ini memerintahkan orang-orang mukmin supaya memenuhi akad dan janjinya apabila mereka melakukan perjanjian dalam suatu transaksi.

Kedua butir-butir perjanjian dalam transaksi itu dirancang dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak secara bebas tetapi penuh tanggung jawab, selama tidak bertentangan dengan peraturan syariat dan adab sopan santun.

Ketiga setiap transaksi dilakukan secara suka rela, tanpa ada paksaan atau intimidasi dari pihak manapun.

Keempat hukum (*syari'*) mewajibkan agar setiap perencanaan transaksi dan pelaksanaannya didasarkan atas niat baik, sehingga segala bentuk penipuan, kecurangan, dan penyelewengan dapat dihindari. Bagi yang tertipu atau dicurigai

¹⁹*Ibid.*

diberi hak *khiar* (kebebasan memilih untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi tersebut).

Kelima penentuan hak yang muncul dari suatu transaksi diberikan oleh syara' pada *urf* atau adat untuk menentukan kriteria dan batasannya. Artinya *urf* atau adat kebiasaan dalam bidang transaksi sangat menentukan selama syara' tidak menentukan lain. Namun ada juga yang mendefinisikan muamalah tersebut sebagai hukum syara' yang berkaitan dengan masalah kehidupan.²⁰

2. Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Hukum Perbankan

Undang-Undang Nomor tahun 1992 tentang Perbankan dalam pasal 3 mengenai fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Artinya pihak bank dan masyarakat adalah sama dan sebangun. Sementara undang-undang yang dikeluarkan lebih banyak memproteksi pihak bank dari pada masyarakat, kecuali ketika menyangkut kepentingan bank.

Prinsip-prinsip muamalah, adalah nilai-nilai yang mengandung perlindungan terhadap pihak-pihak yang melakukan transaksi, terutama tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam suatu transaksi. Sebagai pihak yang melakukan transaksi, perbankan mestinya mengakomodasi prinsip-prinsip muamalah. Prinsip-prinsip muamalah terimplementasi dalam operasional perbankan mulai dari Unndang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, kemudian diganti dengan Unndang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, kemudian diganti dengan Unndang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Perbankan Indonesia, untuk selanjutnya lahirlah Undang-Undang Nomor

²⁰ Nurfaizal, *op. cit.*, h. 188

21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.²¹

Operasional perbankan Syari'ah dijalankan dengan menggunakan piranti-piranti keuangan yang mendasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

1) Musyarakah (*Joint Venture Profit Sharing*)

Kontrak ini dua pihak atau lebih (termasuk bank dan lembaga keuangan bersama nasabahnya) dapat mengumpulkan modal mereka untuk membentuk sebuah perusahaan (*syirkah al inan*)” sebagai sebuah badan hukum (*legal entity*). Setiap pihak memiliki bagian secara proposional sesuai dengan kontribusi modal mereka dan mempunyai hak mengawasi (*voting right*) perusahaan sesuai dengan proposinya. Untuk pembagian keuntungan, setiap pihak menerima bagian keuntungan secara proposional dengan kontribusi modal masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya.

2) Mudharabah (*Trustee Profit Sharing*)

Kontrak mudaharaba juga merupakan suatu bentuk equito financing, tetapi mempunyai bentuk (*feature*) yang berbeda dari musyarakah. Pada mudharabah, hubungan kontrak bukan antar pemberi modal, melainkan antara penyedia dana (*shaibul maal*) dengan entrepreneur (*mudharib*). Pada kontrak mudharabah, seseorang mudharib (dapat berupa perorangan, rumah tangga perusahaan atau suatu unit ekonomi, termasuk bank) memperoleh modal dari unit ekonomi lainnya untuk tujuan melakukan perdagangan. Mudharib dalam kontrak ini menjadi

²¹ *Ibid.*

trustee atas modal tersebut.²²

Ada dua tipe mudharabah, yaitu *Mutlaqah* (tidak terikat) dan *muqayadah* (terikat).

- a. Mudharabah *Mutlaqah*: pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Pengelola bertanggungjawab untuk usaha sesuai dengan praktek kebiasaan usaha normal yang sehat (*uruf*).
- b. Mudharabah *Muqayyadah*: pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagiannya. Pengelola menggunakan modal tersebut dengan tujuan yang dinyatakan secara khusus, yaitu untuk menghasilkan keuntungan.²³

Perbankan Syari'ah juga menerapkan prinsip jual-beli, oleh karena itu jual beli merupakan kegiatan muamalah, dalam perbankan Pengertian jual-beli meliputi berbagai akad pertukaran (*Exchange contract*) antara suatu barang dan jasa dalam jumlah tertentu atas barang jasa lainnya. Penyerahan jumlah atau harga barang dan jasa tersebut dapat dilakukan dengan segera (*cash and carry*) ataupun secara tangguh (*deferred*). Oleh karenanya, untuk memenuhi kebutuhan tipe kontrak jual-beli tangguh (*deferred contract of Exchange*).

²² Muhammad Safi'i Antonio, *op. cit.*, h. 23

²³ *Ibid.*

Fiqih Muamalah telah diidentifikasi dan diuraikan macam-macam jual-beli, dalam Islam sebagai berikut;

1. *Bai' al mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Berperan sebagai alat tukar. Jual-beli semacam ini menjiwai semua produk-produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual-beli.
2. *Bai' al muqayyadah*, yaitu jual-beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (*barter*). Aplikasi jual-beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (*devisa*). Karena itu dilakukan pertukaran barang dengan barang yang dinilai dalam valuta asing. Transaksi semacam ini lazim disebut *counter trade*.
3. *Bai' al sharf*, yaitu jual-beli atau pertukaran satu mata uang asing dengan mata uang asing lain, seperti antara rupiah dengan dollar, dollar dengan yen dan sebagainya. Mata uang asing yang dalam bentuk uang giral (*telegrafic transfer* atau *mail transfer*).
4. *Bai' al murabahah* adalah akad jual-beli barang tertentu. Dalam transaksi jual-beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
5. *Bai' al musawamah* adalah jual-beli biasa, di mana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
6. *Bai' al muwadha'ah* yaitu jual-beli di mana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah dari pada harga pasar atau dengan potongan (*discount*).
7. *Bai' as salam* adalah akad jual-beli di mana pembeli membayar uang

(sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya sedangkan barang yang diperjual belikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati. Bai' as salam biasanya dilakukan untuk produk-produk pertanian jangka pendek.

8. *Bai' al istishna'* hampir sama dengan Bai' as salam, yaitu kontrak jual-beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.²⁴

²⁴ Imam Santoso, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Tarbiatuna, 2003), h. 21

BAB III

UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARI'AH

A. Sejarah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah

Sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Guna mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional.

Undang-undang tidak terlepas dari sejarah kelahirannya. Undang-Undang Perbankan Syari'ah, tidak dapat dilepaskan dari *historis* (sejarah), artinya lahirnya institusi di atas bukan institusi yang “*a-historis*” melainkan “*historisch bepaald*”. Artinya munculnya dinamika hukum itu tidak dapat melepaskan atau menyembunyikan dinamika sosial di belakangnya. Hukum tumbuh, berkembang dan ambruk disebabkan oleh dinamika dalam masyarakat.¹

Seiring dengan tantangan perubahan sosial, politik, budaya, dan pengaruh globalisasi pemikiran dan pemahaman hukum juga mengalami penyesuaian agar tidak tertinggal dari ritme perubahan yang diungkapkan oleh Von Savigny maka hukum akan berubah seiring dengan perubahan masyarakat, atau dalam ungkapan

¹ M. Mansyur Ali, dalam (http://www.pa-rembang.go.id/artikelperadilan/48_kajianfilosofisdanyuridisterhadapruperbankanSyari'ah.html). Diakses pada tanggal 17 April 2012

lain, “*The Fronties of legal science is always changing*” dan “*Trade for fellow The ship*”, *Al hukmu yaduuru 'ala ilaati wujudan wa'adaman*. Oleh karena itu, upaya membangun hukum nasional Indonesia yang mampu memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, menuju tercapainya keadilan hukum dilandasi oleh asas kegunaan (*doelmatigheid*) dan landasan hukum (*rechmatigheid*) yang jelas diharapkan tercapai apa yang menjadi cita-cita hukum yakni keadilan (*Gerechtigheid*), kegunaan (*Zwechmassigheid*) dan kepastian hukum (*Rechtsicherheit*).²

Regulasi yang berkenaan dengan perbankan Syari'ah sejak kemunculannya ditahun 1992, telah banyak diterbitkan, mulai dari penyisipan istilah “bagi hasil” dalam pasal 7 ayat 12, pasal 6 huruf m dan pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kemudian disusul dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Selain Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, keberadaan perbankan Syari'ah saat ini ditopang sejumlah aturan Bank Indonesia. Antara lain SK Direksi BI No 32/34/Kep/Dir, tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari'ah dan SK Direksi BI No 32/36/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syari'ah.³

Falsafah pembentukan Undang-undang perbankan Syari'ah dimana perbankan Syari'ah secara falsafah berbeda dengan perbankan konvensional.

² *Ibid.*

³ Khalil Jafril, *UU Perbankan Syari'ah Antara Kebutuhan, Rasionalitas dan Politis (Bagian 1)*, Digital Library Perpustakaan Riset BI. Akses Tanggal 21 April 2012

Bahkan bukan saja berbeda malah bertolak belakang. Ketentuan hukum perbankan Syari'ah mesti berdasarkan ketentuan Allah, Rasul (*Divine made law*).⁴

Mudharabah harus diarahkan dalam bentuk sektor riil, sedangkan undang-undang perbankan yang ada pada waktu itu melarang bank untuk berinvestasi secara langsung kecuali dalam sektor keuangan. Dengan demikian substansi yang paling utama dalam perbankan Syari'ah bertabrakan dengan undang-undang perbankan yang ada. Akibatnya bank Syari'ah tidak mungkin bisa mengejar ketertinggalannya kalau masih menggunakan konsep undang-undang yang ada.⁵

Agar tercapai tujuan pembangunan nasional dan dapat berperan aktif dalam persaingan global yang sehat, diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat untuk menggali berbagai potensi yang ada dimasyarakat guna mendukung proses akselerasi ekonomi dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional. Salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (Syari'ah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam Sistem Hukum Nasional. Prinsip Syari'ah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada Prinsip Syari'ah yang disebut Perbankan Syari'ah.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

Prinsip Perbankan Syari'ah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syari'ah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi resiko. yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.⁶

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 yang disahkan pada tanggal 16 Juli 2008 memiliki beberapa ketentuan umum yang menarik untuk dicermati. Ketentuan umum dimaksud (Pasal 1) adalah merupakan sesuatu yang baru dan akan memberikan implikasi tertentu, meliputi:

1. Istilah Bank Perkreditan Rakyat yang diubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah. Perubahan ini untuk lebih menegaskan adanya perbedaan antara kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip Syari'ah.
2. Definisi Prinsip Syari'ah. Dalam definisi dimaksud memiliki dua pesan penting yaitu (1) prinsip Syari'ah adalah prinsip hukum Islam dan (2) penetapan pihak/lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar prinsip Syari'ah.

⁶ Dikutif dari (<http://www.bi.go.id/web/id/perbankan/perbankan+Syari'ah/>), tanggal, 23

3. Penetapan Dewan Pengawas Syari'ah sebagai pihak terafiliasi seperti halnya akuntan publik, konsultan dan penilai.
4. Definisi pembiayaan yang berubah secara signifikan dibandingkan definisi yang ada dalam UU sebelumnya tentang perbankan (UU No. 10 tahun 1998). Dalam definisi terbaru, pembiayaan dapat berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam dan transaksi sewa menyewa jasa (*multijasa*).

Asas kegiatan usaha perbankan Syari'ah adalah prinsip Syari'ah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud dengan berasaskan prinsip Syari'ah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung riba, maisir, gharar, objek haram dan menimbulkan kezaliman. Sedangkan yang dimaksud dengan berasaskan demokrasi ekonomi adalah kegiatan usaha yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan. Tujuan dari perbankan Syari'ah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional (Pasal 2 dan Pasal 3).

Fungsi dari perbankan Syari'ah, selain melakukan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, juga melakukan fungsi sosial yaitu (1) dalam bentuk lembaga baitul maal yang menerima dana zakat, infak, sedekah, hibah dan lainnya untuk disalurkan ke organisasi pengelola zakat, dan (2) dalam bentuk lembaga keuangan Syari'ah penerima wakaf uang yang menerima wakaf uang dan menyalurkannya ke pengelola (*nazhir*) yang ditunjuk (Pasal 4).⁷

⁷ Ikhtisar Undang -Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah

B. Sejarah Singkat tentang Perbankan Syari'ah

Bank atau perbankan (*banking*), berasal dari bahasa Itali, *banco* adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, dengan tujuan memenuhi kebutuhan kredit dengan modal sendiri atau orang lain.

Sebagai lembaga keuangan, bank menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, dan badan-badan usaha Milik Negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.

Hukum perbankan di Indonesia dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. Muhammad Djumhana mendefinisikan hukum perbankan dengan kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain.

Hukum perbankan adalah seperangkat kaedah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petuga-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan dan lain-lain yang berkenaan dengan perbankan.⁸

⁸ *Ibid.*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan dan Deregulasi di Sektor Perbankan, sejak 1 Juni 1983 membebaskan bank-bank untuk menetapkan sendiri tingkat bunganya. Hal ini memberikan peluang bagi umat Islam untuk mengoperasionalkan bank tanpa bunga (0%) dengan sistem bagi hasil berdasarkan perjanjian murni.⁹

Prakarsa lebih khusus untuk mendirikan Bank Islam baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan loka karya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor Jawa Barat. Hasil loka karya tersebut dilanjutkan pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990.¹⁰

Tugas penting yang dilakukan oleh tim perbankan MUI di samping pendekatan-pendekatan dan konsultasi dengan pihak terkait, adalah menyelenggarakan pelatihan calon staf melalui “*Management Development Program*” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), sekarang Institute Banking Indonesia di Jakarta. Acara ini dibuka tanggal 29 Maret 1991 oleh Menteri Muda Keuangan, Drs. Nasruddin Sumintapura, MA.¹¹

Pada tanggal 27 Agustus 1991, tim perbankan MUI mengadakan pertemuan dengan mantan Presiden RI ke-2 H.M. Soeharto, di Bina Graha. Dalam pertemuan tersebut Bapak H.M. Soeharto dan H. Sudharmono berkenan menjadi pemrakarsa

⁹ Republika, 27 April 1993, h. 6, kolom 3

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit.*, h. 25

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Ibid.*

dan merencanakan pertemuan dengan para pengusaha muslim pada tanggal 11 Oktober 1991 di Bogor. Pada pertemuan tersebut juga disepakati bahwa Bank Islam yang akan dibentuk itu diberi nama Bank Muamalat Indonesia disingkat BMI.¹²

Pada pertemuan Presiden dengan para pengusaha muslim di Bogor terkumpul dana 106 miliar. Diantara para pengusaha muslim yang turut dalam penggalangan dana tersebut adalah DR. Sukamdi Sahid Gitosarjono, Probosutejo, M. Hasan, Abdul Latif Agus dan banyak lagi pengusaha yang tercantum dalam 227 pemegang saham pendirian Bank Muamalat. Disamping itu terkumpul dana Rp 70 miliar pada pertemuan pengusaha dengan beberapa Menteri di Hotel Sahid Jakarta atas prakarsa Bapak Ginanjar Kartasasmita (ketika itu menjabat sebagai Menteri).¹³

Pengembangan sistem perbankan Syari'ah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan Syari'ah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Karakteristik sistem perbankan Syari'ah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan Syari'ah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat diminati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan Syari'ah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen Syari'ah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.

Berlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan Syari'ah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri

perbankan Syari'ah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.¹⁴

Sebagai langkah konkrit upaya pengembangan perbankan Syari'ah di Indonesia, maka Bank Indonesia telah merumuskan sebuah Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syari'ah, sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yg meliputi aspek-aspek strategis, yaitu: Penetapan visi 2010 sebagai industri perbankan Syari'ah terkemuka di ASEAN, pembentukan citra baru perbankan Syari'ah nasional yang bersifat inklusif dan universal, pemetaan pasar secara lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, peningkatan layanan, serta strategi komunikasi baru yang memposisikan perbankan Syari'ah lebih dari sekedar bank.

Berbagai program konkrit telah dan akan dilakukan sebagai tahap implementasi dari grand strategy pengembangan pasar keuangan perbankan Syari'ah, antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, menerapkan visi baru pengembangan perbankan Syari'ah pada fase I tahun 2008 membangun pemahaman perbankan Syari'ah sebagai *Beyond Banking*, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.50 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 40%, fase II tahun 2009 menjadikan perbankan Syari'ah Indonesia sebagai perbankan Syari'ah paling atraktif di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 75%. Fase III tahun 2010 menjadikan perbankan Syari'ah Indonesia sebagai

¹⁴ Dikutif dari (<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syari'ah/>), Tanggal 20 April 2012

perbankan Syari'ah terkemuka di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81%.

Kedua, program pencitraan baru perbankan Syari'ah yang meliputi aspek positioning, differentiation, dan branding. Positioning baru bank Syari'ah sebagai perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, aspek diferensiasi dengan keunggulan kompetitif dengan produk dan skema yang beragam, transparans, kompeten dalam keuangan dan beretika, teknologi informasi yang selalu up-date dan user friendly, serta adanya ahli investasi keuangan Syari'ah yang memadai. Sedangkan pada aspek branding adalah "bank Syari'ah lebih dari sekedar bank atau beyond banking".

Ketiga, program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap potensi pasar perbankan Syari'ah yang secara umum mengarahkan pelayanan jasa bank Syari'ah sebagai layanan universal atau bank bagi semua lapisan masyarakat dan semua segmen sesuai dengan strategi masing-masing bank Syari'ah.

Keempat, program pengembangan produk yang diarahkan kepada variasi produk yang beragam yang didukung oleh keunikan value yang ditawarkan (saling menguntungkan) dan dukungan jaringan kantor yang luas dan penggunaan standar nama produk yang mudah dipahami.

Kelima, program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank Syari'ah kepada nasabah secara benar dan jelas, dengan tetap memenuhi prinsip Syari'ah.

Keenam, program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan efisien melalui berbagai sarana komunikasi langsung, maupun tidak langsung (media cetak, elektronik, online/web-site), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kemanfaatan produk serta jasa perbankan Syari'ah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.¹⁵

C. Asas, Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah

Asas dari kegiatan usaha perbankan Syari'ah adalah prinsip Syari'ah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud dengan berasaskan prinsip Syari'ah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung riba, maisir, gharar, objek haram dan menimbulkan kezaliman. Sedangkan yang dimaksud dengan berasaskan demokrasi ekonomi adalah kegiatan usaha yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan. Tujuan dari perbankan Syari'ah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional (Pasal 2 dan Pasal 3).¹⁶

Fungsi dari perbankan Syari'ah, selain melakukan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, juga melakukan fungsi sosial yaitu (1) dalam bentuk lembaga baitul maal yang menerima dana zakat, infak, sedekah, hibah dan lainnya untuk disalurkan ke organisasi pengelola zakat, dan (2) dalam bentuk lembaga keuangan Syari'ah penerima wakaf uang yang menerima wakaf uang dan menyalurkannya ke pengelola (*nazhir*) yang ditunjuk (Pasal 4).

Secara umum dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Bank Syari'ah dan Usaha-Usaha Syari'ah wajib memenuhi tata kelola perusahaan yang baik (*good*

¹⁵ Dikutif dari (<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syari'ah/>), Tanggal 20 April 2012, *Ibid*

¹⁶ Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah

corporate governance), prinsip kehati-hatian dan pengelolaan resiko. Selain itu, Bank Syari'ah dan Usaha-Usaha Syari'ah diwajibkan pula untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah dan perlindungan nasabah termasuk kewajiban untuk menjelaskan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya resiko. kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui Bank Syari'ah (Pasal 34, Pasal 35, Pasal 38 dan Pasal 39).¹⁷

Penerapan prinsip kehati-hatian, Bank Syari'ah dan UUS diwajibkan untuk menempuh cara-cara yang tidak merugikan kepentingan nasabah deposan, yaitu antara lain wajib mentaati ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP). Besarnya BMPP adalah 30% dari modal Bank Syari'ah bagi nasabah penerima fasilitas atau sekelompok nasabah penerima fasilitas, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan Bank Syari'ah atau Usaha-Usaha Syari'ah.¹⁸

Terkait resiko. pembiayaan dimana nasabah penerima fasilitas tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka Bank Syari'ah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui maupun di luar pelelangan yang wajib diselesaikan (dijual) oleh Bank dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Selain dapat dibeli oleh bank, agunan juga dapat dikuasakan oleh pemilik agunan kepada bank untuk dijual (Pasal 40).

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Nafrizal, *op. cit.*, h. 185

bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Menurut UU No.21 Tahun 2008 Fungsi Perbankan Syariah;

1. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi social dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana social lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bank Syariah memiliki fungsi yang berbeda dengan Bank Konvensional.

Fungsi dari Bank Syariah adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Manajer Investasi

Salah satu fungsi Bank Syariah yang terpenting adalah sebagai manajer investasi. Bank Syariah adalah manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) dari dana yang dihimpun yang disebut dengan deposan atau penabung. Karena besar kecilnya bagi hasil yang diterima pemilik dana sangat bergantung dari pendapatan yang diperoleh Bank Syariah dalam mengelola dana mudharabah. Fungsi ini dapat dilihat pada segi

penghimpunan dana Bank Syariah, khususnya dana mudharabah, bertindak sebagai manajer investasi dalam arti dana tersebut harus disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun tersebut dapat menghasilkan pendapatan yang akan dibagi-hasilkan kepada pemilik dana.

2. Sebagai Investor

Dalam penyaluran dana Bank Syariah berperan sebagai investor atau pemilik dana. Dana ini disalurkan pada sektor-sektor produktif dan mempunyai resiko yang sangat minim. Keahlian serta profesionalisme sangat diperlukan dalam menangani penyaluran dana ini. Penerimaan pendapatan dan kualitas aktiva produktif yang baik menjadi tujuan yang penting dalam penyaluran dana, karena pendapatan yang diperoleh akan dibagi-hasilkan kepada deposan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pasal-Pasal yang memuat Prinsip-Prinsip Muamalah

Pasal-pasal yang memuat prinsip-prinsip muamalah dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pasal 1 ayat (1) berikut ini;

”Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.

Prinsip muamalah yang termuat dalam pasal 1 ayat 1 merupakan pelembagaan sebuah perbankan dan unit usaha syari’ah yang sesuai dengan ajaran Islam yang mana didalam sistemnya jauh dari pada riba dan subhad, tujuannya untuk memudahkan umat Islam untuk mendepositokan atau melakukan penitipisan dan peminjaman yang tidak lagi dengan bunga tetapi dengan nisbah bagi hasil.

Selanjutnya ayat (12) pasal 1 berikut ini;

”Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”.

Prinsip muamalah yang terdapat pada ayat 12 pasal 1 ini sangat jelas sekali bahwa perbankan dan unit syariah tidak boleh keluar dari hukum Islam dalam setiap kegiatan transaksi yang dilakukan oleh perbankan syariah, hukum Islam

menjamin keadilan dan rahmatan lil'alamn bagi umat Islamn dan umat yang lainnya.

Dalam ayat 25 pasal 1 berikut ini;

”Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Prinsip muamalah yang terdapat pada pasal 1 ayat 25 ini adalah berbagai macam transaksi dan pinjaman yang diberikan oleh bank syariah untuk membantu perekonomian umat islam pada khususnya dan umat-umat yang lain pada umumnya, karena dengan berbagai bentuk pinjaman ini masyarakat luas akan merasakan dampak yang lebih baik dan mereka tidak disibukkan dengan nilai suku bunga seperti bank konvensional, namun bank syariah menawarkan berbagai macam bagi hasil, dan itu menguntungkan bagi nasabah.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas

dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil”.

Untuk selanjutnya prinsip muamalah juga dijelaskan dalam pasal 2 berikut ini;

“Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian”.

Prinsip muamalah dalam pasal 2 ini merupakan demokrasi ekonomi bagi umat manusia dan kegiatan ekonomi sesuai syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan pemerataan, dan kemamfaatan. Selanjutnya yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga. Dan juga pihak bank wajib untuk berhati-hati untuk menjaga amanah dari pihak lain untuk melakukan peminjaman modal pada pihak ketiga.

Untuk selanjutnya prinsip muamalah juga dijelaskan dalam pasal 19 berikut ini;

Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:

- a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad

mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

- c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna', atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- i. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah;

- j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- o. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad wakalah;
- p. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- q. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip syariah yang dijelaskan oleh pasal 19 ini, bahwa pihak bank menjaga amanah dari nasabah tentang uang mereka yang disimpan di perbankan syariah, dan juga membantu nasabah untuk menyalurkan dana mereka kepada pihak ketiga. Dan bank bertanggung jawab atas semua resiko yang diakibatkan oleh bank itu sendiri. Prinsip muamalah dalam pasal ini juga yang berhungan

dengan kepercayaan dari nasabah bagi bank dan kepercayaan bank terhadap nasabah.

Untuk selanjutnya prinsip muamalah juga dijelaskan dalam pasal 55 ayat (1s/d3) berikut ini;

1. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Dalam setiap kegiatan ekonomi sudah barang tentu terjadi perselisihan antara pihak bank dengan nasabah, dalam menyelesaikan pertikaian bank syariah akan mengajukan ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pihak bank dengan nasabah. Karena dalam setiap sengketa kita harus mendapatkan satu kepastian hukum. Dan sengketa bisnis syariah juga bisa diselesaikan melalui Badan Adbidtrase Syariah Nasional yang ada di Indonesia untuk menyelesaikan perkara-perkara bisnis syariah.

Kegiatan ekonomi merupakan salah satu dari aspek muamalah dari sistem Islam, sehingga kaidah fiqih yang digunakan dalam mengidentifikasi transaksi-transaksi ekonomi juga menggunakan kaidah fiqih muamalah. Kaidah fiqih muamalah adalah sebagai berikut:

الأصلُ في العقودِ والمُعَامَلَةِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالتَّحْرِيمِ

Artinya; “Asal atau pokok dalam masalah transaksi dan muamalah adalah sah, sehingga ada dalil yang membatalkan dan yang mengharamkannya”.¹

Ini berarti bahwa semua hal yang berhubungan dengan muamalah yang tidak ada ketentuan baik larangan maupun anjuran yang ada di dalam dalil Islam (Al-Qur'an maupun Al-Hadist), maka hal tersebut adalah diperbolehkan dalam Islam.

Kaidah fiqih dalam muamalah di atas memberikan arti bahwa dalam kegiatan muamalah yang notabene urusan ke-dunia-an, manusia diberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk melakukan apa saja yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, sesamanya dan lingkungannya, selama hal tersebut tidak ada ketentuan yang melarangnya. Bahwa dalam urusan kehidupan dunia yang penuh dengan perubahan atas ruang dan waktu, Islam memberikan kebebasan mutlak kepada manusia untuk menentukan jalan hidupnya, tanpa memberikan aturan-aturan kaku yang bersifat dogmatis. Hal ini memberikan dampak bahwa Islam menjunjung tinggi asas kreativitas pada umatnya untuk bisa mengembangkan potensinya dalam mengelola kehidupan ini, khususnya berkenaan dengan fungsi manusia sebagai *khalifatul-lah fil 'ardh* (wakil Allah di bumi).

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 18

Efek yang timbul dari kaidah fiqih muamalah di atas adalah adanya ruang lingkup yang sangat luas dalam penetapan hukum-hukum muamalah, termasuk juga hukum ekonomi. Ini berarti suatu transaksi baru yang muncul dalam fenomena kontemporer yang dalam sejarah Islam belum ada atau dikenal, maka transaksi tersebut “dianggap” diperbolehkan, selama transaksi tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip yang dilarang dalam Islam.

Prinsip muamalah yang diterapkan oleh perbankan Syari’ah sebagai mana yang terdapat pada pasal 1 ayat 12 berikut ini; Prinsip Syari’ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syari’ah.²

Undang-undang ini juga menjelaskan bagaimana akad yang mengatur antara kewajiban antara kreditur dan debitur sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 13 berikut ini; Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syari’ah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syari’ah.³

Pasal ini menjelaskan bagaimana terbukanya para pihak dalam melakukan kerjasama antara bank dengan para nasabah dalam membuat perjanjian yang mengikat diantara pihak bank sebagai penyandang dana dan nasabah sebagai pelaku usaha. Karena akad merupakan sesuatu yang wajib dalam hukum fiqih muamalah, karena transaksi dalam Islam itu harus jelas dan transparan, jauh dari unsur ghoror.

² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah, Pasal 1 ayat 12

³ *Ibid*, Pasal 1 ayat 13

Prinsip muamalah yang tergambar dalam undang-undang ini sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat 25 berikut ini;

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
2. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
3. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna';
4. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
5. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syari'ah atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁴

Pasal 1 ayat 25 ini sangat jelas bahwa undang-undang ini menampung aspirasi umat islam, secara gamlang menjelaskan bahwa perbankan Syari'ah menetapkan prinsip-prinsip muamalah dalam fiqih muamalah. Dalam pembiayaan dan sewa-menyewa itu telah mengatur hubungan debitur dengan kreditur. dan nasabah memiliki pilihan dalam melakukan kerjasama dengan pihak bank Syari'ah.

⁴ *Ibid*, Pasal 1 ayat 25

Prinsip muamalah dalam undang-undang ini sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 berikut ini; Perbankan Syari'ah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syari'ah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Perbankan Syari'ah memiliki fungsi sebagai penerima dana dan penyalur dana dari masyarakat terutama dari umat Islam. Sebagai lembaga keuangan harus memiliki prinsip kehati-hatian dalam melakukan transaksi sebagai mana yang dijelaskan dalam pasal 2 diatas. Al-Qur'an menyatakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan transaksi: Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Baqarah (2): 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوهَا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيعلمكم الله ﷻ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah ia menuliskan, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu. (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.(QS. Al-Baqarah:282)⁵

Islam menjunjung tinggi keadilan yang merupakan salah satu dasar

teori ekonomi Islam. “Adil diartikan dengan *La Tazlim Wa La Tuzlam* (Tidak menzalimi dan tidak dizalimi) dengan kata lain tidak ada pihak yang dirugikan. Al-Qur'an menyatakan tidak ada pihak yang dirugikan: Hal tersebut dijelaskan dalam An-Nisa' (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(Q.S. An-Nisa' : 29)⁶

⁵ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 234

⁶ *Ibid.*

Kedua ayat diatas merupakan penerapan prinsip muamalah dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, kalau dilihat kembali pada pasal dua diatas dapat dilihat bahwa pasal itu telah sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282 dan surat An-Nisa' ayat 29 diatas.

Prinsip muamalah juga tercermin dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berikut ini; Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Pasal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia pada umumnya terutama umat islam pada khususnya. Al-Qur'an menyatakan meningkatkan kesejahteraan rakyat: Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Maa'idah (5): 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَى وَلَا الْقَلْبَ وَلَا
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya; “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadnya, dan binatang-binatang, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya, dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-

menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”(QS. Al-Maa'idah:2).⁷

Ayat ini sangat jelas bahwa Allah memerintahkan pada umat manusia untuk saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan kemaslahatan, bank sebagai lembaga keuangan mempunyai kewajiban untuk membantu masyarakat yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya atau bisnisnya, sebagai sebuah lembaga keuangan tentu tidak semudah itu untuk memberikan pinjaman pada pihak kreditur, tentu harus mengacu pada pasal 2 dan surat Al-Baqarah ayat 282 sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

Pasal 36 undang-undang perbankan dijelaskan sebagai berikut; Dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syari'ah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syari'ah dan/atau UUS dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya.

Al-Qur'an menyatakan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dana: Hal tersebut dijelaskan dalam An-Nisa' (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya; “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa': 29)⁸

Ayat diatas dapat dilihat dalam menjalankan usaha tidak boleh memakan harta sesama muslim dengan jalan bathil atau merugikan pihak lain, pasal ini

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

mencerminkan bahwa dalam melakukan pendanaan kepada nasabah pihak bank tidak boleh merugikan nasabah dan begitu juga sebaliknya pihak nasabah yang melakukan peminjaman tidak boleh melakukan kecurangan terhadap bank.

Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tersebut bank berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan nasabahnya, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 41 berikut ini; bank dan pihak terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya.

Kerahasiaan yang dimaksud dalam pasal ini adalah merahasiakan identitas para nasabah, karena seorang muslim itu wajib untuk menjaga nama baik saudaranya dari orang lain, dan bank juga mesti merahasiakan berapa pinjaman yang diberikan pada nasabah yang melakukan peminjaman terhadap bank. Al-Qur'an menyatakan bank juga mesti merahasiakan berapa pinjaman yang diberikan pada nasabah yang melakukan peminjaman terhadap bank: Hal tersebut dijelaskan dalam Faathir (35): 29

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٣٥﴾

Artinya; “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”(QS. Faathir: 29).⁹

Pemaparan diatas dapat dilihat bahwa Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, telah mengakomodasi prinsip-prinsip muamalah yang semestinya diterapkan dalam melakukan usahanya baik untuk pembiayaan dan menerima uang tabungan dari masyarakat khususnya umat Islam. Dalam

⁹ Departemen Agama RI, *Ibid*

menjalankan peranannya Bank Syari'ah harus mengikuti aturan-aturan perundang-undangan dan Syariat Islam, agar perbankan syari'ah tetap teguh memegang prinsip-prinsip muamalah.

B. Prinsip-prinsip Muamalah dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah

Prinsip-prinsip muamalah yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah,

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
2. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
3. transaksi jual beli dalam bentuk *piutang murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
4. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *piutang qardh*; dan
5. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi *multijasa*

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Selanjutnya prinsip-prinsip muamalah yang dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) dari huruf a sampai q berikut ini;

“Akad *wadi'ah* adalah Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang”.

“Akad *mudharabah* dalam menghimpun dana adalah Akad kerja sama antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau Bank Syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad”.

“Akad *mudharabah* dalam Pembiayaan adalah Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian”.

“Akad *musyarakah* adalah Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing”.

“Akad murabahah adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati”.

“Akad salam adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati”.

“Akad istishna adalah Akad Pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni*) dan penjual atau pembuat (*shani*)”.

“Akad *qardh* adalah Akad pinjaman dana kepada Nasabah dengan ketentuan bahwa Nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati”.

“Akad *ijarah* adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri”.

“Akad *ijarah muntahiya bittamlik* adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang”.

“Akad *hawalah* adalah Akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar”.

“Transaksi nyata adalah transaksi yang dilandasi dengan aset yang berwujud”.

“Akad *kafalah* adalah Akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan (*kafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*) ”.

“Akad *wakalah* adalah Akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa”.

“Kegiatan *lainadalah*, antara lain, melakukan fungsi sosial dalam bentuk menerima dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, serta dana kebajikan”.

Setiap aktivitas ekonomi harus berlandaskan kepada sumber hukum ekonomi islam dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi islam dalam berijtihad atas suatu fenomena agama. Dalam ekonomi islam, terdapat prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi dengan bermuamalah dan interaksi antar sesama manusia dalam bidang ekonomi. Prinsip-prinsip ekonomi islam yaitu (1) pada asalnya aktivitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkan, (2) aktivitas ekonomi tersebut hendaknya dilakukan dengan suka sama suka (*'antaradin*), (3) kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak mudharat (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*), dan (4) dalam aktivitas ekonomi tersebut terlepas dari unsur *gharar*, *riba*, *kedhaliman*, dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan syara'. Dengan demikian, prinsip-prinsip ini harus dijadikan sebagai aturan dalam melaksanakan aktivitas ekonomi.

Sistem keuangan dan perbankan modern telah berusaha memenuhi kebutuhan manusia untuk menandai kegiatannya, bukan dengan dananya sendiri,

melainkan dengan dana orang lain, baik dengan menggunakan prinsip penyertaan dalam rangka pemenuhan permodalan (*equity financing*) maupun dengan prinsip pinjaman dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan (*debt financing*).

Islam mempunyai hukum sendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu melalui akad-akad bagi hasil (*profit and loss sharing*), dan akad-akad jual beli (*al-ba'i*) untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan (*debt financing*). Bank Syari'ah tidak menggunakan metode pinjam meminjam uang dalam rangka kegiatan komersial, karena setiap pinjam-meminjam uang yang dilakukan dengan persyaratan atau janji pemberian imbalan adalah termasuk riba.

Dari pasal ini jelas bahwa bank Syari'ah harus menerapkan pasal ini dalam menjalankan usaha perbankannya. Al-Qur'an menyatakan keadilan sebagai tujuan utama dalam *syari'at* Islam: Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Hadid (57): 25

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ
وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٥٧﴾

Artinya; “Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa”.(Al-Hadid: 25).¹⁰

¹⁰ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 289

Menempatkan keadilan sama dengan taqwa kepada Allah SWT. Al-Qur'an menyatakan keadilan sebagai tujuan utama dalam *syari'at* Islam: Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Maidah (5): 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۖ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Arinya; “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”(QS. Al-Maidah: 8).¹¹

Dari pemaparan diatas dapat dilihat bahwa perbankan harus mengimplementasikan prinsip-prinsip muamalah yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Undang-undang ini telah mengakomodir hal-hal yang berkaitan dengan muamalah dan sebagaimana yang telah ditetapkan Syariat Islam.

¹¹ *Ibid.*

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perbankan Syari'ah, telah mengakomodasi prinsip-prinsip muamalah yang diterapkan dalam melakukan usahanya baik untuk pembiayaan dan menerima uang tabungan dari masyarakat khususnya umat Islam. Dalam menjalankan peranannya Bank Syari'ah harus mengikuti aturan-aturan perundang-undangan dan Syariat Islam, agar perbankan syari'ah tetap teguh memegang prinsip-prinsip muamalah. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal-pasal yang memuat prinsip-prinsip muamalah dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, sebagaimana yang termuat secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (1), ayat (12), dan ayat 25 selanjutnya pasal 2, dan pasal 19, dan pasal 55. Namun dengan demikian telah mengakomodasi prinsip-prinsip muamalah. Dalam menjalankan peranannya Bank Syari'ah harus mengikuti aturan-aturan perundang-undangan dan Syariat Islam.
2. Prinsip-prinsip muamalah dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna'. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh. Dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

B. Saran-saran

1. Kepada para ulama-ulama untuk melakukan pengawasan terhadap perbankan Syari'ah agar mereka tetap konsisten dalam menerapkan prinsip-

prinsip muamalah dalam dunia perbankan.

2. Kepada Dewan Pengawas Syari'ah untuk meneliti setiap pelaksanaan produk-produk dan penerapan prinsip muamalah dalam perbankan.
3. Kepada pihak perbankan agar tidak melanggar prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan Dewan Pengawasan Syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Press, 2006
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta : Rajawali Press, 2007
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Terjemahan Al-Qur'an, 1987
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Imam Santoso, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Tarbiatuna, 2003
- Khalil Jafril, *UU Perbankan Syari'ah Antara Kebutuhan, Rasionalitas dan Politis* (Bagian 1), dalam digital Library Perpustakaan Riset BI. Di akses pada tanggal 21 April 2012
- Mawardi, *Ekonomi Islam*, Pekanbaru: Alaf Riau, 2007
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Kepraktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Nafrizal, *Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Syari'ah*, (ttp, tth)
- T. M. Hasbi Al-Shiddiqi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- Himpunan Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Syari'ah, Dilengkapi 44 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang Produk Perbankan Syari'ah, Yogyakarta: Pustaka Zeendy, 2009
- Hidayat Mohammad, *an Overview of Islamic Financing industry in Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Dasar Perbankan Syari'ah, di Bogor tanggal 21-23 Maret 2007, diselenggarakan oleh Batasa Tazkia Consulting
- Republika, 27 April 1993, h. 6, kolom 3
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah
- Farwa MUI Tentang Produk-produk Bank Syari'ah

Akses dari <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syari'ah/>, Tanggal 20 April 2012, Jam 10.35 Wib

M. Mansyur Ali, Akses (<http://www.pa-rembang.go.id/artikelperadilan/48kajianfilosofisdanyuridisterhadapruuperbankanSyari'ah.html>), 17 April 2012, Jam 14.15 Wib